

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah transformasi perubahan terutama pada struktur sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai sebuah kemakmuran. Menurut Todaro (dalam Murni 2016), Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial-ekonomi, sikap masyarakat, dan institusi – insitusi nasional. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan peningkatan hidup bagi seluruh masyarakat. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita nasional atau masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas pembangunan ekonomi adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi (Murni, 2016). Menurut Soekirno (dalam Tutupoho, 2019), pertumbuhan ekonomi bergantung pada pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai langkah-langkah peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional. Kemajuan sarana dan prasarana infrastruktur

ekonomi serta kemakmuran masyarakat suatu daerah merupakan cerminan dari adanya pembangunan.

Dalam pengaturan terkait pembangunan daerah, pemerintah telah merumuskan aturan yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui perubahan sistem dari berpusat menjadi otonomi, dampak positif dapat dirasakan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan terlibat langsung dalam proses pembangunan di wilayahnya. Pentingnya pendekatan ini terletak pada perbedaan sumber daya alam dan manusia di setiap daerah, sehingga diperlukan strategi dan sistem yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta sumber daya yang ada. Dengan demikian, implementasi sistem, strategi, dan sasaran pembangunan dapat dilakukan secara tepat dan efisien.

Kompleksitas pembangunan daerah akan semakin meningkat pada periode otonomi daerah saat ini. Menurut Budiarto (2020), kesenjangan antar wilayah dan berkembangnya globalisasi dapat menimbulkan persaingan antar wilayah yang semakin ketat, sehingga hal tersebut dapat berpotensi mendongkrak tingkat daya saing suatu daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Rosyidah, 2022). Setiap daerah memiliki perbedaan potensi yang dimiliki serta kebijakan yang diambil dalam mengelola potensi tersebut juga berbeda pada setiap daerah. Perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Untuk itu pemerintah dalam kebijakan perencanaan pembangunan perlu menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Tujuannya adalah

untuk mengoptimalkan serta mempercepat proses pembangunan dengan melakukan optimalisasi penggunaan potensi dan sumber daya yang ada.

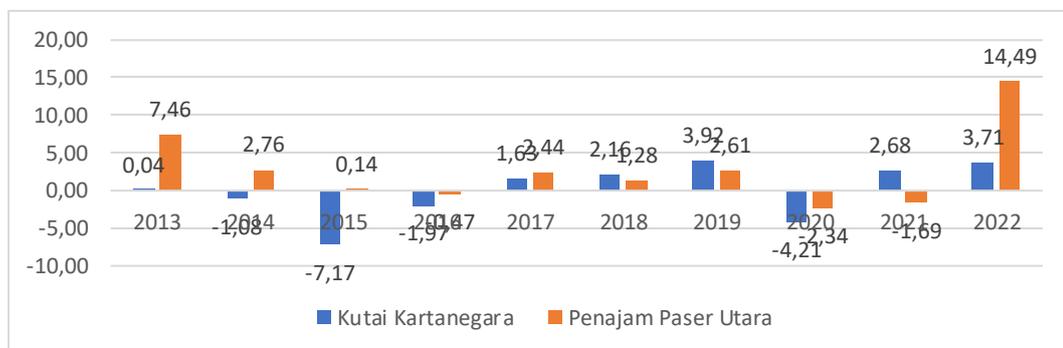
Keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi wilayah bisa diukur dengan adanya kenaikan pada Produk Domestik regional Bruto (PDRB) suatu wilayah yang berdasarkan pada harga konstan ataupun harga berlaku. PDRB adalah salah satu penanda keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah (ALEXANDRO, 2013). Menurut Sabilla & Sumarsono, (2022) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas unit ekonomi di suatu daerah dikenal dengan nama Produk Domestik Regional Bruto atau PDB (Savira & Fatimah, 2022). Selain PDRB, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk. Suatu daerah yang memiliki tingkat PDRB yang tinggi tidak serta merta memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi juga. Faktor jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat PDRB per kapita menjadi rendah (BPS dalam Rosyidah; 2023).

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditetapkan sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Jokowi. Dengan menjadi bagian dari IKN, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk mendapatkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur dan sektor – sektor ekonomi. Selain mendukung meningkatkan daya saing ekonomi kedua kabupaten, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian daerah maupun nasional. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang

berdekatan dengan Kota Samarinda juga memberikan keuntungan logistik yang besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah sebesar 27.263,10 km² dan pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 738,189 jiwa dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 384,005 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 354,184 jiwa. Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah sebesar 3.333,06 Km². Pada tahun 2022, Kabupaten Penajam paser Utara dihuni oleh 183.043 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 94.481 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 88.5622 jiwa.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (Persen)

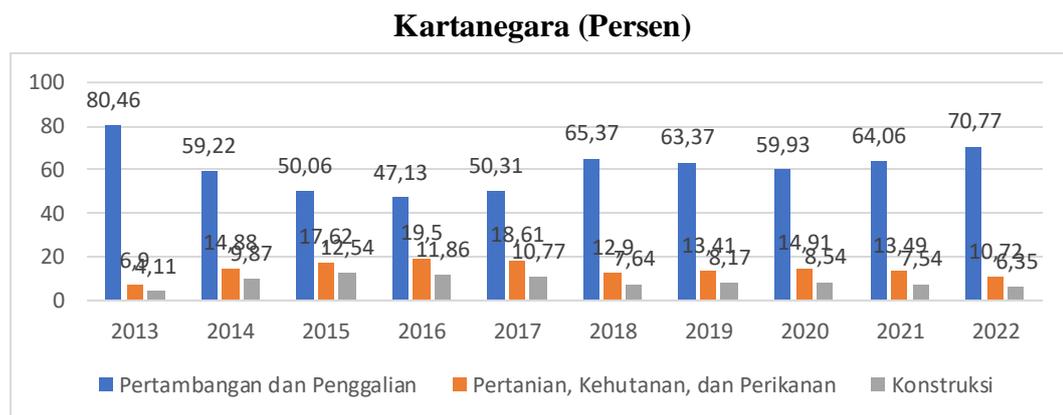


Sumber: (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2023)

Berdasarkan pada data gambar 1.1 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 2013 – 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 – 2016, laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan 2,01 persen. Pada tahun 2016 – 2019, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami

pertumbuhan 5,89 persen. Tahun 2019 – 2022, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan tipis sebesar 0,21 persen. Selisih penurunan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 7,93 persen di tahun 2013 – 2016 dan berhasil mengalami kenaikan pertumbuhan PDRB sebesar 3,08 persen di tahun 2016 – 2019. Pada tahun 2019 – 2022, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kenaikan signifikan sebesar 11,88 persen. Kenaikan signifikan tersebut disumbang oleh banyaknya sektor yang mengalami pertumbuhan positif yang salah satunya adalah sektor konstruksi yang mampu tumbuh sebesar 64,62 persen di tahun 2022.

Gambar 1.2 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Kutai



Sumber: Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara

Berdasarkan data gambar 1.2, terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sepanjang tahun, sektor Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi sebagai penyumbang nilai PDRB terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2022, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 70,77 persen. Sektor Pertanian dan Perkebunan menyusul sebesar 10,72 persen, dan sektor Konstruksi sebesar 6,3 persen.

Gambar 1.3 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara

Berdasarkan data gambar 1.3, penyumbang terbesar nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 adalah sektor Konstruksi yaitu sebesar 24,11 persen, disusul sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,62 persen, dan sektor Pertanian dan Perkebunan sebesar 19,41 persen. Sepanjang tahun 2013 – 2022, perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian.

Pembangunan wilayah tidak hanya dapat diukur dari struktur dan pertumbuhan ekonominya, tetapi juga melalui potensi ekonominya yang dilihat dari indikator seperti pendapatan per kapita, keunggulan kompetitif, dan keunggulan komparatif. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan menciptakan sektor – sektor ekonomi yang unggul dan berdaya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Identifikasi sektor ekonomi unggulan penting untuk dilakukan dikarenakan sektor tersebut mampu memberikan pendapatan baik dari dalam maupun dari luar daerah. Sektor unggulan memiliki andil besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sektor Unggulan Serta Daya Saing Ekonomi Di Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Penajam Paser Utara**”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan daya saing sektor ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang diharapkan menjadi acuan dan arahan bagi daerah untuk merencanakan pengembangan sektor potensial yang berkelanjutan, memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada agar terjadi peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu merancang strategi pembangunan ekonomi serta dapat mendukung kesuksesan dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan mampu menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Sektor ekonomi mana yang dapat mendorong pertumbuhan dan memiliki daya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara?
3. Sektor ekonomi mana yang tumbuh relatif cepat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara?
4. Sektor mana yang memiliki keunggulan serta daya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara?
5. Bagaimana *Tipology Klassen* di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara?

6. Bagaimana besaran angka pengganda (*Multiplier effect*) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sektor yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan memiliki daya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara
3. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang tumbuh relatif cepat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara
4. Untuk mengetahui sektor yang memiliki keunggulan serta daya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Untuk mengetahui *Tipology Klassen* di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara
6. Untuk mengetahui besaran angka pengganda (*Multiplier effect*) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang analisis sektoral serta daya saing yang dimiliki di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara dengan menggunakan analisis *Location Quotient*, *Shift Share*, *Tipology Klassen*, dan *Multiplier effect*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan seputar perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, sektor basis dan unggulan serta *multiplier effect* di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi ilmiah dalam penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini
4. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi dalam membantu membuat keputusan terkait dengan kebijakan pemabangunan, merumuskan strategi yang efektif, serta membantu dalam mendukung perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi